

DESENTRALISASI FISKAL DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH: TANTANGAN HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT–DAERAH DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Navila Ayu Ariyanti¹, Hanifah Rosyidah Az Zahroh², Ravienda Anita Fitri³
25040674110@mhs.unesa.ac.id¹, 25040674108@mhs.unesa.ac.id², reviendafitrie@unesa.ac.id³
Universitas Negeri Surabaya

ABSTRAK

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu kebijakan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan daerah secara mandiri guna meningkatkan pelayanan publik dan mendorong pembangunan ekonomi daerah. Namun, pelaksanaan kebijakan ini sering menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi desentralisasi fiskal dan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur serta mengidentifikasi berbagai tantangan dalam hubungan keuangan pusat dan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan serta analisis data sekunder yang diperoleh dari laporan pemerintah, publikasi statistik, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian keuangan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan seperti tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat, keterbatasan sumber pendapatan daerah, serta inefisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan tata kelola keuangan daerah, serta optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah guna mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal yang efektif dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, Keuangan Daerah, Hubungan Pusat–Daerah, Otonomi Daerah.

ABSTRACT

Fiscal decentralization is an important policy in the implementation of regional autonomy in Indonesia. Through fiscal decentralization, local governments are granted authority to manage regional finances independently in order to improve public services and promote regional economic development. However, the implementation of this policy often faces various challenges, particularly in the financial relationship between the central and local governments. This study aims to analyze the implementation of fiscal decentralization and regional financial management in East Kotawaringin Regency and to identify the challenges that arise in central–regional fiscal relations. This research employs a qualitative approach using a literature study and secondary data analysis obtained from government reports, statistical publications, and previous studies. The results show that fiscal decentralization provides opportunities for local governments to increase regional financial independence through local revenue (PAD). However, several challenges remain, including the high dependence on transfer funds from the central government, limited local revenue sources, and inefficiencies in regional financial management. Therefore, strengthening institutional capacity, improving financial governance, and optimizing local revenue sources are necessary to support effective fiscal decentralization and sustainable regional development.

Keywords: Fiscal Decentralization, Regional Finance, Central–Regional Relations, Regional Autonomy.

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu kebijakan penting dalam sistem pemerintahan Indonesia sejak era reformasi tahun 1998. Kebijakan ini merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan memberikan kewenangan yang lebih besar

kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya serta menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Dengan adanya desentralisasi fiskal, diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah (Mardiasmo, 2018).

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia diatur melalui berbagai regulasi, di antaranya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah memperoleh berbagai sumber pendanaan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dari pemerintah pusat, serta sumber pendapatan lain yang sah. Sistem ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah sekaligus mendorong peningkatan kemandirian keuangan daerah.

Meskipun demikian, implementasi desentralisasi fiskal di berbagai daerah masih menghadapi berbagai macam tantangan yang ada. Salah satu permasalahan utama adalah tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Banyak daerah yang memiliki kapasitas fiskal terbatas sehingga belum mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah secara mandiri (Shah, 2018). Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan desentralisasi fiskal dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah belum sepenuhnya tercapai dan terealisasikan.

Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki potensi sumber daya alam cukup besar, terutama pada sektor perkebunan, kehutanan, dan pertanian. Potensi ekonomi tersebut seharusnya dapat menjadi sumber pendapatan daerah yang signifikan dalam mendukung pembangunan daerah. Namun berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023, sebagian besar pendapatan daerah masih berasal dari dana transfer pemerintah pusat, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah masih relatif kecil dibandingkan total pendapatan daerah (Badan Pusat Statistik, 2023).

Selain itu, pengelolaan keuangan daerah juga masih menghadapi berbagai tantangan seperti efisiensi penggunaan anggaran, optimalisasi belanja pembangunan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi desentralisasi fiskal belum sepenuhnya berjalan secara optimal di tingkat daerah.

Berbagai penelitian mengenai desentralisasi fiskal telah banyak dilakukan di Indonesia, namun kajian yang secara khusus menganalisis implementasi desentralisasi fiskal serta tantangan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan gambaran mengenai kondisi kemandirian fiskal daerah serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi desentralisasi fiskal dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang muncul dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kajian Literatur

Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan serta menentukan prioritas pembangunan daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran serta memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah terhadap

masyarakat (Mardiasmo, 2018).

Menurut teori fiscal federalism, desentralisasi fiskal memungkinkan pemerintah daerah menyediakan layanan publik secara lebih efisien karena pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih baik mengenai kebutuhan masyarakat lokal dibandingkan pemerintah pusat (Oates, 1999). Dengan demikian, kebijakan fiskal yang diterapkan di tingkat daerah diharapkan lebih responsif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sistem hubungan keuangan tersebut bertujuan menciptakan keseimbangan fiskal serta mendukung pelaksanaan pembangunan daerah secara efektif (Bird & Vaillancourt, 2006).

Dalam konteks Indonesia, hubungan keuangan pusat dan daerah diwujudkan melalui berbagai mekanisme seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH). Mekanisme ini bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah serta meningkatkan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan publik (Shah, 2018).

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah meliputi seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien agar mampu mendukung pembangunan daerah secara optimal (Halim, 2007).

Kinerja keuangan daerah dapat diukur melalui beberapa indikator seperti tingkat kemandirian fiskal, efektivitas pendapatan daerah, serta efisiensi penggunaan anggaran. Semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal daerah, maka semakin besar kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri (Khusaini, 2018).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Metode ini digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang relevan melalui berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, laporan pemerintah, serta publikasi statistik yang berkaitan dengan desentralisasi fiskal dan pengelolaan keuangan daerah.

Objek penelitian dalam studi ini adalah implementasi desentralisasi fiskal dan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik, laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dokumen pemerintah daerah, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik desentralisasi fiskal.

Teknik analisis data dilakukan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan cara mengkaji berbagai literatur yang relevan, mengelompokkan informasi yang diperoleh, serta menginterpretasikan data untuk memahami fenomena hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Kotawaringin Timur

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Kabupaten Kotawaringin Timur memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan secara lebih mandiri. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah dapat menentukan prioritas

pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Namun demikian, pendapatan daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat. Meskipun Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, kontribusinya terhadap total pendapatan daerah masih relatif kecil (Badan Pusat Statistik, 2023).

Kemandirian Fiskal Daerah

Tingkat kemandirian fiskal daerah dapat dilihat dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah. Di Kabupaten Kotawaringin Timur, kontribusi PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan dana transfer pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri masih terbatas.

Rendahnya kontribusi PAD disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain terbatasnya basis pajak daerah, belum optimalnya pengelolaan aset daerah, serta rendahnya efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Tantangan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

Dalam implementasi desentralisasi fiskal, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, antara lain tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat, keterbatasan sumber pendapatan daerah, serta kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan keuangan daerah yang masih perlu ditingkatkan (Smoke, 2020).

Selain itu, perbedaan potensi ekonomi antar daerah juga menyebabkan kesenjangan kemampuan fiskal antar wilayah, sehingga beberapa daerah masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan daerah.

Kinerja Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

Berdasarkan data laporan kinerja APBD tahun 2023, struktur pendapatan daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah masih relatif kecil dibandingkan dengan pendapatan transfer pusat.

Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023

Sumber Pendapatan	Jumlah
Pendapatan Daerah	Rp4,45 Triliun
Pendapatan Transfer Pusat	Rp3,60 Triliun
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp513,85 Miliar
Pajak Daerah	Rp248,83 Miliar

Sumber: APBD Kabupaten Kotawaringin Timur 2023

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar pendapatan daerah masih berasal dari transfer pemerintah pusat. Pendapatan transfer mencapai lebih dari Rp3,6 triliun atau sekitar 80 persen dari total pendapatan daerah, sedangkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah hanya sekitar Rp513 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah masih relatif rendah dan pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dukungan fiskal dari pemerintah pusat.

Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa banyak daerah di Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan daerah (Shah, 2018; Smoke, 2020).

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Kabupaten Kotawaringin Timur memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan secara lebih mandiri. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah dapat menentukan prioritas

pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Namun demikian, struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah masih relatif rendah. Rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lokal.

Menurut teori fiscal federalism yang dikemukakan oleh Oates (1999), desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya karena pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih baik mengenai kebutuhan masyarakat lokal. Namun dalam praktiknya, keberhasilan desentralisasi fiskal sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan pemerintah daerah serta kemampuan daerah dalam menggali potensi pendapatan lokal.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat masih menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Kabupaten Kotawaringin Timur. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Shah (2018) dan Smoke (2020) yang menyatakan bahwa banyak pemerintah daerah di negara berkembang masih memiliki kapasitas fiskal yang terbatas sehingga masih bergantung pada dukungan fiskal dari pemerintah pusat.

Selain itu, keterbatasan basis pajak daerah serta belum optimalnya pengelolaan aset daerah juga menjadi faktor yang mempengaruhi rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam mengoptimalkan potensi ekonomi daerah guna meningkatkan kemandirian fiskal.

KESIMPULAN

Desentralisasi fiskal merupakan kebijakan yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan pembangunan regional di Indonesia. Kebijakan ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan secara mandiri guna meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi desentralisasi fiskal di Kabupaten Kotawaringin Timur belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat serta rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah masih relatif rendah sehingga pemerintah daerah masih menghadapi berbagai tantangan dalam membiayai pembangunan secara mandiri. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ada beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan yaitu:

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah daerah perlu mengembangkan potensi sumber pendapatan daerah melalui peningkatan pajak daerah, retribusi daerah, serta pengelolaan aset daerah secara lebih optimal.

2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan publik sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran.

3. Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel guna meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mencegah penyalahgunaan anggaran.

4. Penguatan Sinergi Pusat dan Daerah

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan fiskal guna menciptakan sistem hubungan keuangan yang lebih seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ma'ruf. (2008). *Pertumbuhan Ekonomi: Determinan dan Prospeknya*.
- Akai, N., & Sakata, M. (2020). Fiscal decentralization and public sector efficiency. *Public Finance Review*.
- Arsyad, Lincoln. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur. (2023). *Kabupaten Kotawaringin Timur dalam Angka*.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Keuangan Daerah Indonesia*.
- Bahl, R., & Bird, R. (2018). *Fiscal decentralization and local finance in developing countries*. Public Administration and Development.
- Bahl, Roy. (1999). *Implementation Rules for Fiscal Decentralization*. Atlanta: Georgia State University.
- Basri, Y. Z. (2003). *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*.
- Bird, R., & Vaillancourt, F. (2006). *Fiscal Decentralization in Developing Countries*. Cambridge University Press.
- Boadway, Robin., & Shah, Anwar. (2009). *Fiscal Federalism: Principles and Practices of Multiorder Governance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Boex, Jamie., & Martinez-Vazquez, Jorge. (2005). *The Determinants of the Incidence of Intergovernmental Grants*. *Public Finance Review*.
- Faguet, J. (2019). *Decentralization and governance*. *World Development*.
- Faguet, Jean-Paul. (2014). *Decentralization and Governance*. *World Development Journal*.
- Falleti, Tulia. (2010). *Decentralization and Subnational Politics in Latin America*. Cambridge University Press.
- Farida, S. (2011). *Sistem Ekonomi Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Khusaini, Mohammad. (2018). *Keuangan Daerah*. Malang: UB Press.
- Kuncoro, Mudrajat. (2000). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Litvack, Jennie., Ahmad, Junaid., & Bird, Richard. (1998). *Rethinking Decentralization in Developing Countries*. Washington DC: World Bank.
- Mankiw, N. Gregory. (2014). *Principles of Economics*.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*.
- Martinez-Vazquez, Jorge., & McNab, Robert. (2003). *Fiscal Decentralization and Economic Growth*. *World Development*.
- Musgrave, R. (1959). *The Theory of Public Finance*.
- Nordiawan, Deddi. (2012). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nordiawan, Deddi., Putra, Iswahyudi., & Rahmawati, Maulidah. (2010). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Oates, Wallace. (1999). *An Essay on Fiscal Federalism*.
- Prakoso, Bambang. (2004). *Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.

- Prud'homme, R. (1995). The Dangers of Decentralization. World Bank Research Observer.
- Rodden, J. (2006). Hamilton's Paradox: The Promise and Peril of Fiscal Federalism.
- Rondinelli, Dennis. (1981). Government Decentralization in Comparative Perspective. International Review of Administrative Sciences.
- Shah, A. (2018). Fiscal federalism and macroeconomic governance. World Bank Publications.
- Sidik, Machfud. (2002). Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Jakarta: Departemen Keuangan.
- Simanjuntak, Robert. (2015). Desentralisasi Fiskal dan Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: UI Press.
- Smoke, P. (2020). Rethinking decentralization. Public Administration Review.
- Sukirno, Sadono. (2014). Makroekonomi: Teori Pengantar.
- Suwandi, Made. (2016). Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya terhadap Pembangunan Daerah. Jurnal Administrasi Publik.
- Tambunan, Tulus. (2019). Perekonomian Indonesia dalam Era Otonomi Daerah. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Todaro, Michael P. (2006). Economic Development.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- World Bank. (2006). Fiscal Decentralization Handbook.
- World Bank. (2017). Indonesia Public Expenditure Review: Spending for Better Results. Washington DC.
- Yushkov, Andrey. (2015). Fiscal Decentralization and Regional Economic Growth. Regional Studies.